IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ILHAM OKTAVIAN

NIM : 18103070083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M

NIP. 19850301 201801 1 002

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRACT

The background of the problem in this research is how the form of the implementation of Pancasila democracy in the Village Head Election in Pasirnangka Village is seen from the view of Siyasah Syariyyah. The main problem is then formulated in several sub-problems or research questions, namely: 1) What is the form of implementation of Pancasila democracy in the Village Head Election in Pasirnangka Village, Tangerang Regency, Banten Province. 2) What is Siyasah Syariyyah's view in the election of the Village Head in Pasirnangka Village, Tangerang Regency, Banten Province How is Siyasah Syariyyah's view in the election of the Village Head in Pasirnangka Village, Tangerang Regency, Banten Province How is Siyasah Syariyyah's view in the election of the Village Head in Pasirnangka Village, Tangerang Regency , Banten Province.

This type of research is classified as a qualitative field research with a juridical-normative approach. There are two sources of data for this research, namely primary data sources, namely data obtained from sources, namely the chairman of the BPD, chairman of the PILKADES committee, and the community, while secondary data is obtained from other sources such as books and other scientific studies. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data processing techniques and data analysis were carried out through four stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

The results of this study indicate that the implementation of village head elections in Pasirnangka Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency is in accordance with Pancasila democracy and is guided by the Tangerang Regent's Regulation number 79 of 2014 concerning Procedures for Elections, Elections Inter-Time and Dismissal of the Village Head this is marked by the smooth process of selecting the village head starting from the formation of the committee to voting. The village head election is held by an election committee formed through the Village Consultative Body (BPD), and its members consist of elements of village officials, community institution administrators, and village community leaders. The inhibiting factors are the location of more polling stations that must be held and the lack of socialization related to the implementation of the Village Head Election in Pasirnangka Village.

Keywords: Pancasila Democracy, Village Head Election, Siyasah Syariyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk implementasi demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka menilik dari pandangan Siyasah Syariyyah. Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu : 1) Bagaimana bentuk implementasi demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 2) Bagaimana pandangan Siyasah Syariyyah dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Bagaimana pandangan Siyasah Syariyyah dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Bagaimana pandangan Siyasah Syariyyah dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka, Kabupateng Tangerang, Provinsi Banten.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field reseach*) kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yakni data yang didapat dari narasumber yaitu ketua BPD, ketua panitia PILKADES, dan masyarakat, sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari sumber lain seperti buku dan kajian ilmiah lainnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk Teknik pengolahan data dan analisis data yang dilakukan melalui empat tahapan yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan demokrasi Pancasila dan berpedoman pada Peraturan Bupati Tangerang nomor 9 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa hal ini ditandai dari kelancaran proses pemilihan kepala desa mulai dari pembentukan panitia sampai pada pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa. Faktor penghambat yaitu letak TPS yang harus diadakan lebih banyak dan kurangnya Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka.

Kata kunci: Demokrasi Pancasila, Pemilihan Kepala Desa, Siyasah Syariyyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Oktavian
NIM :18103070073
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH"** adalah hasil penelitian/karya pribadidan sepanjang sepengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan , dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 September 2022
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
FE9AKX125803110

Ilham Oktavian
NIM: 18103070073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan

HukumUIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Oktavian

NIM :18103070073

Judul :"Implementasi Demokrasi Pancasila Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Syariyyah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2022 M.

28 Sya'ban 1443 H.

Pembimbing,

GUGUN EL GUYANIE, S.H., LL.M

NIP. 19850301 201801 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1795/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM OKTAVIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070083
Telah diujikan pada : Selasa, 22 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 63a5942ee2726

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63a9268e857ba

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 639be9e598036

Yogyakarta, 22 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a94366e4e30

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 26/12/2022

MOTTO

“Jadilah Seperti Bunga Yang Memberikan Keharuman Bahkan Bagi Yang Menghancurkannya”

(HABIB BAHAR BIN ALI BIN SMITH)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan kepada:

Kedua Orang Tua Saya, Bapak Atmojo S.T Dan Ibu Rosmini S.Pd.

Adik Saya, Aliyah Nurlatifah

Kakek Dan Nenek Saya

Keluarga Besar Saya

Para Guru Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman, Sahabat, serta Orang yang berarti untuku tanpa terkecuali

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	……..	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	…‘…	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	…’…	apostrof
ي	Yā	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	*Nazzala*
بهن	Ditulis	*Bihinna*

B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
بالمصلحة	Ditulis	*Bil-mashalah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserapdalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	*A fa'ala*
ذكر	Kasrah	Ditulis	*I Żukira*
يذهب	Dammah	Ditulis	*U Yażhabu*

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	*Â Falâ*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	*Â* *Tans* *Â*
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	*Î* *Tafṣîl*
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis	*Û* *Uṣûl*

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	*Ai* *az-zuhailî*
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	*Au* *ad-daulah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*A'antum*
أعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئنشكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*l*"

القرأن	Ditulis	*Al-Qur'ân*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunaka huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	*As-Samâ'*
الشمش	Ditulis	*Asy-Syams*

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawî al-furûḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-sunnah*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُرَمَضَا نَ الّذى أَنْزلَ فيْه اَلْقُرْءَانُ

Syahru ramadān al-lażī unzila fīhil-Qur`ānu

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْعَالَمِينَ رَبِّ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya atas terlaksananya penyusunan skripsi ini dengan judul "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Tinjau Menurut Perspektif Maslahah Mursalah" Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik material maupun spiritual dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi. Yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
6. Segenap bapak-ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
7. Segenap bapak-ibu staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

administrasi selama perkuliahan.

8. Orang tuaku tercinta, Bapak Atmojo S.T dan Ibu Rosmini S.Pd. sosok orang tua yang tidak henti-henti mendoakan,memotivasi, menasihati, dan memberi segala bentuk dukungan lainnya yang ditujukan kepada Penulis demi menggapai yang dicita- citakan.
9. Risa Nurul Insan seseorang yang selalu memberikan support dalam menyelesaikan skripsi untuk menempuh gelar sarjana.
10. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2018
11. Keluarga Asrama Mahasiswa Belitung Timur "Betiong" Yogyakarta
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat Kami,

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **I**
ABSTRACT ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **v**
MOTTO ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teori 7
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 18
BAB II LANDASAN TEORI **20**
A. Demokrasi Pancasila 20
B. Siyasah Syariyyah 27
BAB III PEMBAHASAN **34**
A. Pemilihan Kepala Desa Pasirnangka 34
B. Kebebasan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka 47
C. Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pasirnangka 53
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN **56**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pasirnangka Dilihat Dari Tinjauan Demokrasi Pancasila Dan Siyasah Syariyyah 56
B. Kebebesan Hak Pilih Pada Pilkades Di Desa Pasirnangka 69
C. Partisipasi Politik Masyarakat Dilihat Dari Demokrasi Pancasila Dan Siyasah Syariyyah.....74
BAB V PENUTUP.....85
A. KESIMPULAN.....85
B. SARAN.....87
DAFTAR PUSTAKA.....88
LAMPIRAN-LAMPIRAN 92
CURRICULUM VITAE.....98
A. BIODATA DIRI.....98
B. RIWAYAT PENDIDIKAN 98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala Desa adalah pemimpin yang terpilih dan ditetapkan oleh BPD dan di sahkan oleh Bupati.[1] Secara demokrasi dan secara tradisional kepala desa dipilih oleh warga yang mana ia adalah seorang wakil perpanjang tangan dari masyarakat untuk dapat mengatur, menjaga dan memotivasi warganya dalam proses pembangunan di desa, sehingga peran kepemimpinan kepala desa sangatlah berpengaruh terhadap maju-mundurnya dan berkembang atau tidak berkembangnya suatu pembangunan di desa.

Pemilihan Kepala Desa dalam sistem demokrasi sudah menjadi bagian dari politik, di mana masyarakat dianjurkan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Pemilihan Kepala Desa diterapkan agar masyarakat bisa memilih pemimpin daerah dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak mana pun. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi tingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa sangat penting karena sangat mendukung Penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan transparan dan partisipasi masyarakat, di mana calon Kepala Desa tidak diusung oleh partai melainkan

[1] Suhardimang, Hadi Daeng Mapuna. "Paslon Tunggal Pilwalikota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Hukum Tatanegara*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2020), hlM. 71.

perseorangan sehingga tidak ada kepentingan partai yang di bawa oleh calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang dilaksanakan di setiap Desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembal untuk dua kali masa jabatan. Persoalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat (partisipasi politik) tetapi, pemerintah sebagai penyelenggara Negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik.[2]

Desa memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya, sehingga desa merupakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat yang paling bawah dan memiliki pemerintahan sendiri. Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[3]

Wilayah Desa Pasir Nangka sendiri pada umumnya terdiri dari daerah perindustrian yang dimana tidak lain mata pencaharian dari penduduk desa atau

[2] Amiryllah Umar, "Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.7, No 2, (Juli 2014), hlm 112.

[3] Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksananya, (Bandung: Fokusmedia), hlm 27.

masyarakat desanya yaitu buruh atau pegawai swasta, yang mana jika dilihat dari data pemenang pada kontestasi pilkades tahun 2017 latar belakang dari seorang yang terpilih jadi kepala desa yaitu pegawai swasta, Adapun desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimana di dalam suatu desa terdapat juga suatu dusun atau wilayah yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang diketuai atau dipimpin oleh seorang kepala dusun. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun pun terdiri dari beberapa RW dan RT. Dalam sistem pemerintahan desa, kepala dusun merupakan unsur perangkat desa dan juga merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Maka Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul ”Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Syariyyah.

B. Rumusan Masalah

1) Bagaimana Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pasirnangka Dilihat Dari Tinjauan Demokrasi Pancasila Dan Siyasah Syariyyah ?
2) Bagaimana Kebebasan Hak Memilih Pada Pilkades Di Desa Pasirnangka ?
3) Partisipasi Politik Masyarakat Dilihat Dari Demokrasi Pancasila Dan Siyasah Syariyyah ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

Adapun menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa pokok pembahasan yaitu

a) Untuk mengetahui Implementasi Demokrasi Pancasila Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dilihat dari kebebasan hak memilih dan partisipasi masyarakat.

b) Untuk mengetahui bagaimana Pemilihan Kepala Desa Pasirnangka Dilihat dari Perspektif Siyasah Syariyyah yang dilihat dari kebebasan hak pilih dan partisipasi masyarakat.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Secara teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi atau dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan dalam suatu lingkup pemerintahan di desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan penelitian yang akan dilakukan.[4] Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Putri Nopitasari "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa" (Studi di Desa Tunas Mudo dan Sekernan, Kecamatan Sekernan)"[5]. Yang dipublikasikan pada tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan lapangan (*Field Research*) yang membahas tentang demokrasi pemilihan kepala desa di Desa Tunas Mudo dan Sakernan, Kecamatan Sakernan. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Demokrasi dalam pemilihan kepala desa Tunas Mudo dan Sekernan disambut antusias oleh masyarakat di setiap tahapan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri ikut serta dalam demokrasi tersebut.

Kedua, skripsi Firda Ayu Lestari FH, "Kontestasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah".[6] yang diunggah atau di publikasikan pada tahun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Tim Fakultas syariah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press,2009). Hlm 3.

[5] Putri Nopitasari,"Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa, (Studi di Desa Tunas Mudo dan Sekernan, Kecamatan Sekernan)", (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

[6] Firda Ayu Lestari FH, "Kontestasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah", (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2021).

2021. Hasil dari penelitian penulis dijelaskan bahwa Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Gareccing pada tahun 2016 lalu mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat hal ini dibuktikan bahwa tidak adanya tekanan maupun intimidasi politik dari pihak mana pun serta tidak adanya unsur kecurangan atau *money politic* dari kedua pasangan calon kepala desa. Serta perspektif siyasah syariyyah terhadap pemilihan kepala desa bahwasanya berkesan tidak bertentangan dengan Syiyasah syariyyah karna setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dan juga harus mempunyai sifat musyawarah agar dapat menyatukan perbedaan dan mempererat tali silaturahmi. Maka dari itu, Allah SWT melalui Al-Qurannya memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bermusyawarah.

Ketiga, skripsi Ahmad Annizar "Analisis Siyasah Syariyyah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022",[7] yang di publikasikan pada tahun 2018. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana cara pandang siyasah syariyyah terhadap pemilihan kepala desa yang jika bis disimpulkan secara singkat bahwasanya dalam pembahasan tersebut dalam pemilihan kepala desa lebih mengedepankan kepada administratif dari pada akhlak calon kepala desa dan juga Perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan lagi mengawasi peraturan dan proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa.

[7] Ahmad Annizar "Analisis SIyasah Syariyyah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022", (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2018).

Adapun kesimpulan hasil dari tinjauan pustaka yang dilakukan penulis dengan mengamati dan mencermati dari kedua penelitian sebelumnya, maka di sini penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dari penelitian pertama dan kedua tidak satu pun yang peneliti yang membahas tentang Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Syariyyah. Kendati demikian, ada kemiripan judul penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di mana kesamaan tersebut berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa. Akan tetapi, disini penulis lebih memfokuskan Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Syariyyah, yang dimana akan lebih melihat bagaimana apakah dalam penerapan pemilihan kepala Desa tersebut sudah sesuai atau bertentangan dengan perspektif Siyasah Syariyyah tersebut atau tidak.

E. Kerangka Teori

1) Demokrasi Pancasila

Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi dan sosial yang memungkinkan dalam terjadinya praktik kebebasan politik baik secara bebas maupun setara. Dalam demokrasi, warga Negara bisa diizinkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin.[8] Khususnya di Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

Sesuai dengan falsafah Pancasila, di Indonesia demokrasi ditetapkan sebagai alat sekaligus tujuan hidup bernegara. Demokrasi merupakan alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang demokratis. Prinsip dasar suatu

[8] Zainuddin , *Sejarah Demokrasi, Kepemimpinan Pemerintahan*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), hlm 3-5.

kehidupan yang demokratis ialah setiap hidup warga Negara ikut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat ikut serta (partisipasi) dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah.[9]

Ada tiga tanggapan umum yang melekat dalam konsep demokrasi pertama, demokrasi bukan hanya bentuk pemerintahan yang dapat diterima, tapi juga merupakan suatu doktrin politik yang akan menguntungkan banyak negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah jaman Yunani kuno dan sebagai bentuk ideal yang mampu bertahan selama beberapa abad dalam suasana politik penuh dengan gejolak. Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yang natural, dalam arti jika rakyat di negara manapun bisa memenangkan kebebasannya untuk menentukan sendiri sistem politiknya, besar kemungkinan mereka akan memilih demokrasi.

Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana manfaat demokrasi tersebut salah satunya yaitu, kesetaraan sebagai warga negara. Di sini demokrasi memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Ciri-ciri sistem demokrasi di sini untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, yaitu:

a) Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala.

[9] Eko Suprianto, "Memaknai Demokrasi Pemilihan kapala desa", http://gagasanhukum.wordprees.com/2015/, diakses tanggal 23 maret 2022.

b) Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu

c) Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintah

Pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat membutuhkan hal tersebut diantaranya, kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat, demokrasi membutuhkan kerja sama antar warga masyarakat dan sikap serta itikad yang baik, demokrasi yang membutuhkan sikap kedewasaan, dan demokrasi membutuhkan pertimbangan moral.[10]

2) Siyasah Syariyyah

Secara umum Siyasah Syariyyah (Fikih Siyasah) dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[11] Selain pengertian tersebut Abdur Rahman Taj juga mengemukakan definisnya terkait Siyasah Syariyyah. Beliau berpendapat bahwa Siyasah Syariyyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-

[10] Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Adminstrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992) , hlm 79.

[11] Prof. H. A. Djazuli, MA., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm 134.

tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafsili yang juz'I dalam al-Quran dan Sunnah.

Dalam teori Siyasah Syariiyyah terdapat beberapa prinsip di dalamnya yang menjadi bagian dari pada memilih sebuah pemimpin, diantaranya:

1. Prinsip Kemaslahatan dan Prinsip Keadilan

prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Prinsip kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Sementara prinsip keadilan adalah perlakuan yang sama atau tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kaidah Siyāsah juga terdapat berbagai metode atau kaidah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada. Salah satu kaidah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat.

Kaidah di atas menegaskan bahwa tindakan dan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara harus disesuaikan dengan jiwa keputusan peraturan, dan perundang-undangan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. oleh karena itu kepentingan dan kemaslahatan masyarakat menjadi hal utama yang harus

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diperhatikan oleh pemegang kekuasaan agar kepentingan dan kemaslahatan masyarakat dapat benar-benar terwujud.

2. Prinsip Amanah

Demokrasi Pancasila di desa, sangat erat kaitannya dengan prinsip amanah, yang mana kewenangan merupakan amanah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan, hal itu karena apabila prinsip amanah diabaikan maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya demokrasi di desa. Mengingat pentingnya prinsip amanah tersebut, sehingga al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam menjelaskan dalam salah satu ayatnya yang berbunyi:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

Yang artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (QS:An-nisa:58)"

Dari ayat di atas sudah dapat diketahui bahwasanya dalam memilih pemimpin ada baiknya dilihat dari amanah atau tidaknya dalam menentukan keputusan dengan cara yang adil. Selain itu implementasi demokrasi Pancasila dalam pemilihan kepala desa juga tidak dapat dijalankan dengan oleh perangkat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

desa saja, akan tetapi perlu adanya bantuan dari seluruh unsur masyarakat agar demokrasi Pancasila dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.[12] Selain itu penelitian juga merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan suatu kebenaran.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Desa Pasirnangka. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang di perlukan untuk penelitian skripsi ini.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata lisan maupun tertulis serta objek yang digambarkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Pasirnangka pada tahun 2017.

[12] Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif,cet Ke-1* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm 11.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.[13] Atau dengan kata lain penelitian ini bersifat deskripsi-analitis, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.

4. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[14]

Penelitian tersebut menjelaskan masalah yang diteliti dari data yang telah ada. Penelitian deskriptif melihat dari situasi sosial yang ada di lapangan sedangkan penelitian lebih mengarah pada kata-kata dan gambaran. Lingkup penelitian ini adalah lingkup peran serta Pemerintah, masyarakat dalam Implementasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka.

---

[13] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

[14] Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data di sini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum yang dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.[15]

Data primer dari penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan demokrasi dalam pemilihan kepala desa kususnya di Desa Pasirnangka Kecamatan Tiagaraksa. Data primer yang peneliti maksud adalah pemahaman peneliti dari Permendagri Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa, dan Perbup Nomor 9 Tahun 2014 tentang cara pemilihan, pemilihan antar waktu, dan pemberhentian kepala desa. Serta informasi-informasi yang diperoleh secara langsung yang diambil melalui wawancara kepada Kepala Desa, Panitia pelaksana pemilihan, dan Masyarakat Desa Pasirnangka.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data Sekunder (pendukung) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, makalah, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.[16]

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.
[16] *Ibid*, hlm 143

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen kantor kepala desa, data dari panitia pelaksana pemilihan, dan perpustakaan setempat.

Adapun sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah sumber peristiwa ataupun pengalaman yang terjadi di Desa Pasirnangka dalam Pemilihan Kepala Desa secara demokrasi, dalam berkampanye dan penghitungan suara. Peneliti mengumpulkan data dari wawancara Kepala Desa, panitia pemilihan Kepala Desa serta Masyarakat Desa Pasirnangka. Data pendukung lainnya yaitu dokumen-dokumen dari kantor desa seperti: profil desa, Perkembangan Desa Pasirnangka.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin[17]. Sehingga peneliti mendapatkan data utama dalam menilai demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa Pasirnangka. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan.

[17] W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm 116.

b. Wawancara atau interview yaitu percakapan antara dua orang untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan-pertanyaan, dimana ada yang bertindak selaku informan. Teknik wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, wawancara merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu metode penelitian. Wawancara (*interview*) dapat didefinisikan sebagai cara untuk mendapatkan informasi (data) dari informan dengan cara bertanya secara langsung, bertatap muka (*face to face*) atau menggunakan sarana komunikasi lainnya seperti telepon.[18]

Adapun yang wawancarai terdiri dari 9 orang yaitu :

No	Jabatan	informan
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	BPD	1 Orang
4	Panitia	1 Orang
5	Tokoh Agama	1 Orang
6	Tokoh Adat	1 Orang
7	Masyarakat	2 Orang

[18] Bagong suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (cet.3, Jakarta : Kencana, 2007), hlm 83.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jumlah	8 Orang

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara yang kemudian di klarifikasikan sesuai jenis data yang disusun dengan logis untuk menjawab permasalahan. Untuk menganalisis data, penulis melakukan beberapa tahapan, antara lain :

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari lapangan, gambar, dokumen dan lainnya. Kemudian diperiksa kembali, diatur dan diurutkan kembali.

2. Reduksi Data

   Reduksi data adalah aktivitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk memecahkan masalah, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.[19]

3. Penyajian Data

   Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dapat membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atas bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

4. Verifikasi Data

[19] Sayuti Una (Editor), Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revsi, (Jambi: Fakultas Syari"ah Iain sts Jambi dan Syariah Press, 2012). hlm 235-236.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Verifikasi Data dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara,[20] dokumentasi studi literatur kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari hasil yang terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, pembahasan terkait arah dan tujuan diletakan pada bab pertama dengan tujuan agar pembaca mengetahui alasan, tujuan, cara dan kemana penelitian ini ingin dituju, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pada bab-bab selanjutnya.

BAB II : Penjelasan mengenai Demokrasi Pancasila dan Siyasah Syariyyah yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : Berisi tentang gambaran umum desa, dasar hukum Pemilihan kepala desa Pasirnangka, dan bagaimana sistem pemilihan kepala Desa di Desa Pasirnangka.

BAB IV : Berisi Analisis data terkait Pengimplementasian Demokrasi Pancasila di desa serta bagaimana pemilihan kepala Desa pasir Nangka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di lihat dari Perspektif Siyasah Syariyyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 147.

BAB V : Bagian penutup dari karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab empat. Kesimpulan di bab ini akan menjawab masalah-masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahkan dapat menjadi penyelesai dari permasalahan yang ada.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada skripsi ini , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Kepala Desa Di Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang di pilih secara langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang periode 2017-2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Tangerang nomor 79 tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pemilihan Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal ini, terlihat dari kelancaran proses pemilihan kepala desa mulai dari pembentukan panitia sampai pada pemungutan suara. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebebasan berpendapat yang terjadi di desa pasirnangka sudah menuai pada prinsip demokrasi pancasila dan siyasah syariyyah yang dimana hal tersebut dilihat dari pendapat ketua panitia pemilihan, masyarakat dan juga tokoh masyarakat yang didapat melalui wawancara, tidak adanya kecurangan berupa money politik suah menandakan bahwasannya pada pemilihan kepala desa di desa pasirnangka sudah

memenuhi kebebasan berpendapat yang dianalisia melalui teori demokrasi pancasila dan juga siyasah syariyyah.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pasirnangka, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada tanggal sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meski demikian masih ada hal yang perlu dibenahi sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya dapat berjalan tanpa adanya hambatan. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yakni letak TPS yang harus diadakan lebih banyak dan kurangnya Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasirnangka.

Mengenai partisipasi masyarakat desa pasirnangka yang mana di lihat dari antusias kehadiran dalam mennetukan pilihan pada pelaksanaan Pilkades berada pada angka 90% menunjukan bahwasannya masyarakat desa pasirnangka memiliki nilai partisipasi yang tinggi, dimana melalui wawancara penulis dengan masyarakat juga membuktikan bahwasannya masyarakat desa pasirnangka juga mengikuti jalannya proses pelaksanaan pilkades dari awal pembentukan panitia sampai pada pelantikan kepala desa, juga dapat disimpulkan bahwasannya partisipasi masyarakat sangat tinggi yang dibarengi dengan kesadaran yang tinggi dalam memilih pemimpin di desa pasirnangka.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, bahwa pemilihan kepala desa ditinjau dari analisis Siyasah Syariyyah dapat dibenarkan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan pada musyawarah sistem atau model apa yang disepakati dalam kehidupan masyarakat.

B. SARAN

1. Perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan lagi mengawasi peraturan dan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa
2. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pasirnangka panitia pemilihan kepala desa yang di bentuk oleh BPD harus lebih ditingkatkan lagi terkait pemahaman kepada warga atau masyarakat yang memenuhi sebagai syarat sah sebagai pemilih agar tidak ada lagi pertanyaan yang timbul mengenai kecurigaan masyarakat.
3. Panitia hendaknya memberikan lagi tambahan TPS terkait dengan adanya pemilihan kepala desa di periode selanjutnya dikarenakan adanya masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut tetapi dengan tidak hilangnya kemeriahan akan pesta demokrasi di tingkat desa, khususnya di desa Pasirnangka
4. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan dan menjaga keharmonisan antar masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan ditingkat desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai demokrasi di tingkat desa, sehingga tercipta nilai moral yang baik. Masyarakat juga lebih memperhatikan tata cara pemilihan yang baik dan benar, serta meningkatkan rasa solidaritas antar masyarakat meski memiliki pilihan yang berbeda.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015).

Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977).

Abdurrahman Taj, *Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif,1993).

Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*. (Beirut: Dar Al-Ajil, 2007).

Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz IV (1960), hlm. 126. 20 Prof. Dr. Rusjdy Ali Muhammad, Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam,Suatu Pengantar dalam bukuMutiara Fahmi Razali, Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat (Yayasan Pena 2014),

Imaduddin Abi Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007.

Imām al-Mawardi, *Aḥkām al-Sulṭniyyah*, Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Imaduddin Abi Fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007.

Imam Al Wahidi, *Asbabun Nuzul*. Bandung: Cordoba, 2015.

Buku

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke 19. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.Jakarta: Rajawali Press. 2009.

--------. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta; Sinar Grafika, 2011.

--------. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakrta: Sinar Grafika 2005.

Arikunto, Suharni. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Bandung: Prenada Media. 2003.

Gulo, W. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011.

Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*,cet Ke-1. Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

--------. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Kusnardi, Moh dan Harmaily *Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara dan FHUI. 1981.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Sanit, Arbi, Partai. *Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, Cetakan 2010.

Soekanto,Soerdjono dan Sri Mahmudji. *Peran dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia. 1979.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Surianingrat, Bayu. *Pemerintahan Adminstrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 1992.

Sunny, Ismail. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, 1984.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih Cetakan Ke 3*. Jakarta: Kencana. 2010.

Zainuddin. *Sejarah Demokrasi, Kepemimpinan Pemerintahan*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tim Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009).

Jurnal & Skripsi

Amiryllah Umar, "*Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.7, No 2, (Juli 2014).

Ahmad Annizar "Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022", (Skripsi Uin Sumatera Utara, 2018).

Dudung Abdullah, "*Musyawarah dalam Al-Qur'an*". *Jurnal Al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2, (Desember 2014).

Firda Ayu Lestari Fh, "Kontestasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Gareccing Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah", (Skripsi Uin Alauddi Makasar, 2021).

Jumadi "Pengaruh Sistem Multi Partai Dalam Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Aldaulah*, Vol. 4 Nomor 1, (Juni 2015).

Neneng Yani Yuningsi, "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa, "Jurnal Politik. Vol. 1, No 2, (Februari, 2016).

Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengkete Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 5 Nomor 2, (Desember 2018).

Putri Nopitasari, Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Tunas Mudo Dan Sekernan, Kecamatan Sekernan), (Skripsi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Suhardimang, Hadi Daeng Mapuna. "Paslon Tunggal Pilwalikota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam", Siyasatuna : *Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Hukum Tatanegara*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2020).

Sabri Samin "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum" *Jurnal Al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1, (Juni 2014).

Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Volume 2, no 2, Oktober 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peraturan Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Uundang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa

Internet dan Wawancara

Eko Suprianto, "Memaknai Demokrasi Pemilihan kapala desa", http://gagasanhukum.wordprees.com/2015/, diakses tanggal 23 maret 2022.

Monica Ayu Caesar Isabela, pengertian Demokrasi Pancasila, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/02000021/demokrasi-pancasila--pengertian-aspek-ciri-dan-prinsip, pada 13 Agustus 2022, pukul 09:08

Syahroni. Kepala Desa Terpilih, "Wawancara", di Pasirnangka, Tanggal 19 Juli 2022

Suhendar, Ketua BPD Desa Pasirnangka, "Wawancara" di Pasirnangka, tanggal 18 juli 2022

Indra Kurniawan, sekertaris Desa Pasirnangka, "Wawancara" di Pasirnangka, tanggal 20 juli 2022.

Muchtar, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa "Wawancara" di Pasirnangka, Tanggal 17 Juli 2022.

Niftah Ramanda, , Masyarakat Desa Pasirnangka, "Wawancara" di Pasirnangka, tanggal 16 juli 2022.

Ikhsan maulana, Masyarakat Desa Pasirnangka, "Wawancara" di Pasirnangka, tanggal 16 juli 2022.

Hariri, Imam Desa Pasirnangka "Wawancara" di Desa Pasirnangka, Tanggal 23 Juli 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA